

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut para ahli seperti Ali Murtopo dan Manuel Kaisiepo, Pemilu merupakan cara utama bagi rakyat untuk menjalankan kekuasaan mereka dan menjadi tanda bahwa suatu negara menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu juga memberikan legitimasi atau pengakuan atas kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa atau pemerintah baru. (Najib, 2016)

Meskipun UUD 1945 tidak secara spesifik menjelaskan tentang pemilu, beberapa pasal yang ada didalamnya dapat diinterpretasikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Misalnya :

- Pasal 1 ayat 2 : Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan salah satu cara rakyat menjalankan kekuasaan ini adalah melalui pemilu.
- Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, yang menunjukkan adanya siklus pemilihan secara berkala.
- Pasal 3 : MPR memiliki kewajiban untuk mengadakan sidang setiap 5 tahun sekali, yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu.
- Pasal 19 : Susunan anggota DPR ditentukan melalui undang-undang yang berarti pembentukan DPR dilakukan melalui pemilu.

Pemilu adalah jantung dari demokrasi, Menurut Samuel P. Huntington, inti dari demokrasi adalah rakyat memilih langsung pemimpin mereka melalui proses yang kompetitif. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih luas, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dijalankan oleh rakyat. Pemilu adalah cara konkret untuk mewujudkan kekuasaan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Sebelum pemilu, calon pemimpin akan berusaha meyakinkan Masyarakat untuk memilih mereka. Di seluruh dunia, pemilu menjadi cara yang umum untuk mengganti atau mempertahankan pemerintahan yang ada. Di negara dengan sistem presidensial, pemilu digunakan untuk memilih presiden. Sedangkan di negara dengan sistem parlementer, pemilu digunakan untuk memilih anggota parlemen yang nantinya akan memilih perdana Menteri. (Arniti, 2020)

Pemilu adalah kewajiban di negara demokratis semua negara yang menganut sistem demokrasi punya aturan tentang pemilu. Aturan ini biasanya tercantum dalam undang-undang dasar negara tersebut. jenis pemilu berbeda-beda cara kita memilih pemimpin tergantung pada sistem pemerintahan negara kita. Di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, kita memilih presiden dan anggota parlemen, sedangkan di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, kita hanya memilih anggota parlemen. (Liando, 2016)

Pemilihan gubernur di Sumatera Barat menjadi perhatian nasional karena karakteristik politiknya yang kuat, termasuk pengaruh besar dari aktor-aktor yang berasal dari latar belakang Polri dan tokoh-tokoh non pemerintah. Sebagai daerah yang memiliki Sejarah politik yang kaya dan Masyarakat yang sangat terlibat dalam proses politik, Sumatera Barat sering kali menjadi barometer dinamika politik lokal di Indonesia. (Sumartias et al., 2017)

Pemilihan gubernur di Sumatera Barat pada tahun 2015-2020 menyoroti pentingnya dinamika kekuatan antara kandidat dari latar belakang militer dan non-pemerintahan. Dalam periode ini persaingan antara kandidat dengan latar belakang Polri dan tokoh sipil semakin memperkaya kompleksitas politik lokal, mencerminkan realitas sosial, ekonomi dan politik Sumatera Barat yang sangat plural. Pada pemilihan gubernur tahun 2015 salah satu kandidat terkemuka adalah Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, seorang tokoh yang datang dari latar belakang akademisi dan bukan berasal dari militer atau pemerintah. Namun. Dalam beberapa pemilihan sebelumnya kandidat yang berasal dari militer, khususnya dari Polri memiliki pengaruh yang kuat. (Sejahtera et al., 2019)

Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc. adalah seorang akademisi, politisi, dan tokoh Masyarakat yang dikenal luas di Sumatera Barat. Selama karir politiknya Irwan Prayitno berhasil membawa perubahan signifikan di wilayah tersebut melalui berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada Masyarakat, Irwan Prayitno memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu tahun 1999 dan terus aktif dalam dunia politik hingga mencapai posisi puncak di Sumatera Barat. (Triana et al., 2020)

Irwan Prayitno menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat selama dua periode. Periode pertama (2010-2015) berpasangan dengan Muslim Kasim, Irwan Prayitno memenangkan pemilu Gubernur dengan dukungan kuat dari Masyarakat Sumatera Barat. Kepemimpinannya di periode ini fokus pada Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat. Periode kedua (2015-2020) Irwan Prayitno berpasangan dengan Nasrul Abit. Ia melanjutkan program-program pemerintah. Kebijakan-Kebijakannya yang pro rakyat membuatnya mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. (Thaufan, 2014)

pada pemilihan gubernur sebelumnya, tokoh-tokoh dari sipil seperti Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai gubernur Sumatera Barat pada periode 2005-2010 menjadi salah satu contoh bagaimana latar belakang militer memainkan peran penting dalam politik lokal. Meski gamawan kemudian lebih dikenal sebagai Menteri dalam negeri di Tingkat nasional, pengaruh Polri dalam politik daerah Sumatera Barat masih terasa kuat. Pada tahun 2015, Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Nasrul Abit memenangkan pemilihan gubernur. Irwan Prayitno berasal dari latar belakang akademisi dan aktivis, dengan afiliasi kuat terhadap partai keadilan Sejahtera (PKS). Ia melanjutkan kepemimpinan di Sumatera Barat selama dua periode hingga 2020. (Gresna & Yogyakarta, 2021)

Disisi lain, pemilihan gubernur tahun 2020 juga diwarnai oleh keterlibatan tokoh-tokoh non-pemerintah yang cukup populer di kalangan Masyarakat Sumatera Barat. Salah satu tokoh yang menjadi perhatian adalah Mahyeldi Ansharullah, seorang walikota Padang yang berasal dari latar belakang non-militer. Mahyeldi didukung oleh PKS dan berpasangan dengan Audy Joinaldy, seorang pengusaha muda yang juga memiliki latar belakang non pemerintah. Persaingan antara Nasrul Abit dan Mahyeldi Ansharullah menggambarkan dinamika yang kompleks antara aktor-aktor militer dan sipil di Sumatera Barat. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa pemilih di Sumatera barat cenderung lebih kritis terhadap latar belakang kandidat baik dari sisi militer maupun non militer. Masyarakat cenderung memilih kandidat berdasarkan kinerja dan rekam jejak, dibandingkan hanya berdasarkan latar belakang institusional. (Susanti & Fahmi, 2022)

Sejarah peran militer dalam politik Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari Sejarah militer di Indonesia secara keseluruhan. Setelah reformasi peran militer dalam politik secara formal berkurang, tetapi pengaruhnya masih terlihat dalam politik lokal Sumatera Barat, dengan sejarahnya yang Panjang dalam mendukung militer, terutama sejak masa orde baru sering kali memiliki kandidat-kandidat yang berasal dari latar belakang Polri. Namun pasca reformasi terdapat kecenderungan yang kuat untuk mendorong aktor-aktor sipil, terutama yang berasal dari kalangan akademis, aktivis, dan pengusaha, untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Pemilihan gubernur tahun 2020 menjadi contoh baik dari bagaimana aktor-aktor non militer dapat mengimbangi kekuatan kandidat militer. (Felinda et al., 2024)

Salah satu faktor yang menentukan hasil pemilihan gubernur di Sumatera Barat adalah preferensi pemilih. Pemilih di Sumatera Barat cenderung memilih berdasarkan rekam jejak kandidat latar belakang militer atau non militer dari seorang kandidat seringkali dipandang sebagai faktor sekunder, meskipun tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Sumatera Barat memiliki populasi yang cenderung mendukung kandidat yang dianggap memiliki rekam jejak kuat dalam pelayanan publik, terlepas dari apakah kandidat tersebut berasal dari militer atau non militer. Sebagai contoh Mahyedi Ansharullah berhasil memenangkan pemilihan gubernur tahun 2020 sebagian besar karena rekam jejaknya yang kuat sebagai walikota padang, yang dipandang berhasil dalam meningkatkan Pembangunan kota dan kesejahteraan Masyarakat. (Handika & Rafni, 2022)

Namun dalam konteks Sumatera Barat, kedua jenis kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh kepemimpinan dari tokoh militer cenderung berfokus pada stabilitas dan keamanan, sedangkan kepemimpinan dari tokoh non pemerintah cenderung lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan sosial. (Yahya et al., 2024)

PKS merupakan salah satu partai politik yang memiliki pengaruh signifikan di Sumatera Barat. Wilayah ini secara historis dikenal sebagai identitas islam yang kuat, Dimana agama dan adat Minangkabau yang sering disebut sebagai “Adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah” (adat berdasarkan syariah, syariah berdasarkan Al-Quran) menjadi dasar kehidupan sosial. Hal ini membuat PKS

memiliki daya Tarik tersendiri di mata Masyarakat Sumatera barat yang cenderung konservatif dan religius. Sejak reformasi PKS terus memperkuat posisinya di wilayah ini dengan menawarkan platform politik yang menggabungkan nilai-nilai islam dengan medornitas. Pada berbagai pemilu dan pilkada, PKS sering kali berhasil mendapatkan dukungan besar Masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kampanye partai ini sering berfokus pada isu-isu keagamaan, moralitas dan keadilan sosial, yang relevan dengan pandangan hidup mayoritas penduduk. (Ibnu Amin, 2022)

Keberadaan PKS di Sumatera Barat mulai dikenal luas setelah reformasi politik tahun 1998. Partai ini muncul sebagai alternatif bagi Masyarakat yang menginginkan perubahan politik yang lebih bersih, berintegritas dan berbasis nilai-nilai agama di Sumatera Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah basis islam yang kuat, PKS dengan cepat mendapatkan tempat di hati pemilih. Pada awal berdirinya PKS dikenal dengan pendekatan politik yang mengedepankan kaderisasi yang kuat, disiplin organisasi dan pola kampanye yang lebih tertata. Hal ini berbeda dengan partai-partai tradisional yang cenderung mengandalkan tokoh-tokoh lokal atau keluarga dinasti politik. PKS di Sumatera Barat berhasil menarik perhatian Masyarakat yang menginginkan perubahan dalam pola kepemimpinan politik yang lebih berbasis pada meritokrasi dan integritas moral. Selama beberapa dekade terakhir, PKS berhasil memenangkan beberapa kursi penting di DPRD Sumatera Barat. Serta mendukung calon-calon kepala daerah yang memiliki afiliasi dengan partai ini. Contoh yang paling menonjol adalah kemenangan Mahyeldi Ansharullah yang terpilih sebagai walikota padang dan kemudian sebagai gubernur Sumatera Barat pada pilkada 2020 kemenangan ini mencerminkan kekuatan PKS di wilayah tersebut. (Yusra, 2018)

PKS berhasil membangun citra sebagai partai yang peduli pada isu-isu keagamaan dan moralitas di Tengah Masyarakat Sumatera Barat. Sebagai daerah yang memiliki Sejarah Panjang dalam hal Pendidikan islam dan pergerakan keagamaan, Masyarakat Sumatera Barat cenderung merespons positif kampanye-kampanye PKS yang berfokus pada nilai-nilai islam. Namun dibalik dukungan yang kuat ini ada juga dinamika yang perlu diperhatikan. Seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, dukungan terhadap partai politik bisa bersifat fluktuatif,

tergantung pada kondisi sosial politik dan persepsi Masyarakat terhadap kebijakan partai tersebut. Di Sumatera Barat PKS mendapatkan tantangan Ketika Masyarakat mulai menuntut lebih banyak dari sekadar retorika keagamaan. (*1 Representasi Sosial Tentang Kiprah PKS Di Panggung Politik Indonesia (Analisis Wacana Situs Dikedaikopi.Net)* Dini Safitri, 2002)

Isu-isu seperti Pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan transparansi pemerintahan menjadi semakin penting di mata Masyarakat. Meskipun PKS masih dipandang sebagai partai yang mewakili nilai-nilai islam, beberapa kalangan Masyarakat mulai merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja partai, terutama dalam hal implementasi program-program yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat. Beberapa kalangan mengkritik PKS karena dianggap terlalu fokus pada isu-isu moral dan keagamaan tanpa memberikan perhatian yang memadai pada isu-isu Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak di Sumatera Barat. PKS menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan dukungannya di Sumatera Barat. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana partai ini bisa tetap relevan di Tengah perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat, khususnya dengan munculnya generasi muda yang lebih kritis dan memiliki harapan yang berbeda dari generasi sebelumnya. (Trianggorowati & Al-Hamdi, 2020)

Isu-isu seperti pengangguran, Pendidikan yang berkualitas dan kesempatan ekonomi menjadi perhatian utama bagi Masyarakat Sumatera Barat, terutama di kalangan generasi muda. Jika PKS ingin terus mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini, partai ini perlu menyesuaikan strategi politiknya dengan memasukkan konkret dan relevan bagi kebutuhan Masyarakat selain itu tantangan lain yang dihadapi PKS adalah bagaimana partai ini bisa terus menjaga citra moralitasnya di Tengah persaingan politik yang semakin ketat. Meskipun PKS memiliki basis dukungan yang kuat dari kalangan muslim konservatif, partai ini harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik identitas yang berlebihan, yang justru dapat mempersempit basis dukungannya di masa depan. (Labodo et al., 2016)

Namun di sisi lain, PKS juga memiliki peluang besar di Sumatera barat. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam

politik, PKS masih dapat memanfaatkan posisinya sebagai partai yang memiliki platform islam yang jelas. Selain itu partai ini juga dapat memperkuat posisinya dengan mengembangkan program-program yang lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, seperti program ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. (Intan Tri Sundari et al., 2022)

Pemilih kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang bagi Masyarakat untuk memilih pemimpin yang dipercaya dapat memajukan daerah. Sejak diterapkannya pemilihan langsung untuk kepala daerah pada tahun 2005, berbagai daerah di Indonesia mengalami dinamika politik yang berbeda-beda. Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji adalah Sumatera Barat ini, khususnya terkait dengan kesuksesan partai keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan kontestasi pilkada gubernur dua kali berturut-turut. Fenomena ini menjadi semakin menarik mengingat sebelumnya dalam beberapa periode, tidak ada partai politik yang berhasil menguasai kontestasi pilkada Tingkat gubernur di daerah ini. (Labodo et al., 2016)

Sebelum PKS menjadi kekuatan dominan di Tingkat provinsi, pilkada di Sumatera Barat sering kali di dominasi oleh calon-calon independent atau kandidat yang diusung oleh koalisi besar partai-partai politik yang relative lemah dalam pengorganisasian dan mobilisasi. Kekuatan calon independent atau tokoh lokal yang tidak terikat oleh partai politik sering kali lebih mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kental di Sumatera Barat, sebuah wilayah dengan karakteristik politik yang unik, Dimana adat dan agama memainkan peran penting dalam struktur sosial masyarakatnya. oleh karena itu, kontestasi politik di Tingkat provinsi seringkali di dorong oleh faktor-faktor personalistik daripada mesin partai politik yang mapan. (Arrasyid et al., 2020)

Namun dalam dua periode terakhir, PKS mampu mengubah lanskap politik Sumatera Barat dengan mendulang suara secara signifikan dan memenangkan kontestasi gubernur dua kali berturut-turut, perubahan ini memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana PKS yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam politik lokal, berhasil menciptakan momentum kemenangan secara beruntun. Bagaimana PKS yang dikenal sebagai partai dengan basis ideologi islam yang kuat,

dapat menyesuaikan diri dengan dinamika politik lokal dan memenangkan kepercayaan Masyarakat di Sumatera Barat? (Irawati, 2012)

Keberhasilan PKS tidak dapat dilepaskan dari kemampuan partai ini untuk memanfaatkan modal sosial dan kultural yang ada di Sumatera barat. Sejak awal PKS menempatkan diri sebagai partai yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang kuat, dua elemen yang sangat dihargai di Sumatera Barat. Kemenangan PKS bisa dipandang sebagai hasil dari strategi partai ini yang secara cerdas menggabungkan pendekatan ideologisnya dengan konteks lokal, termasuk bagaimana partai ini mampu merangkul tokoh-tokoh agama dan adat yang berpengaruh di daerah tersebut. PKS juga menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam memobilisasi dukungan melalui jaringan kadernya yang solid dan terorganisir. Di berbagai wilayah di Sumatera Barat PKS dikenal memiliki struktur partai yang kuat hingga ke Tingkat akar rumput. Struktur ini memungkinkan partai untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menawarkan program-program yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat lokal, serta membangun ikatan yang lebih personal antara kader partai dan pemilih. (Rokhmad, 2014)

Di Tengah fragmentasi politik yang kerap terjadi di daerah, PKS mampu menawarkan stabilitas dan konsistensi dalam visi dan misinya. Selain itu keberhasilan PKS dalam memenangkan dua kali pilkada gubernur Sumatera Barat juga tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan partai-partai lain untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka fragmentasi politik yang terjadi di kalangan partai-partai lain memberikan peluang bagi PKS untuk mengisi kekosongan dan membangun koalisi yang lebih kuat. Partai-partai lain meskipun memiliki basis dukungan yang luas seringkali terjebak dalam konflik internal atau gagal menonjolkan calon yang memiliki daya Tarik yang sama seperti calon-calon yang diusung PKS. (Ikhran Agung Patria, 2023)

Pemilihan gubernur di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh faktor demografi dan perubahan politik di Tingkat nasional. Ketika PKS mulai aktif berpartisipasi dalam kontestasi pilkada perubahan dalam sistem politik nasional juga mulai terasa di daerah-daerah. Pemilih semakin kritis terhadap pilihan politik mereka dan lebih tertarik pada program-program konkret yang bisa langsung dirasakan manfaatnya.

PKS dengan pendekatannya yang berbasis program dan visi yang jelas mampu menjawab tuntutan ini dengan lebih baik dibandingkan partai-partai lain yang cenderung masih terfokus pada politik identitas atau patronase. Dalam konteks yang lebih luas keberhasilan PKS di Sumatera Barat mencerminkan transformasi dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Partai-partai politik yang berhasil menyesuaikan diri dengan konteks lokal dan mampu merespon kebutuhan Masyarakat cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan hati Masyarakat Sumatera barat tetapi juga menunjukkan bahwa dengan organisasi yang solid dan program yang jelas sebuah partai politik dapat mendominasi kontestasi politik bahkan di daerah yang sebelumnya di dominasi oleh calon independent atau tokoh-tokoh non partai. (Trianggorowati & Al-Hamdi, 2020)

Keberhasilan PKS juga tidak dapat dilepaskan dari figur-figur kunci yang diusung PKS memiliki karakteristik yang kuat, baik dari sisi kepribadian maupun rekam jejak. Mereka seringkali dikenal sebagai figure yang bersih, berintegritas, dan memiliki kedekatan dengan Masyarakat, faktor yang sangat penting dalam memenangkan pilkada di daerah seperti Sumatera Barat yang sangat menghargai kejujuran dan moralitas dalam kepemimpinan. Secara keseluruhan keberhasilan PKS mendulang suara dua kali berturut-turut dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat menunjukkan kemampuan partai ini untuk beradaptasi dengan dinamika politik lokal yang kompleks. Meskipun PKS awalnya bukan kekuatan politik utama di daerah ini, melalui strategi yang matang, pengorganisasian yang solid dan pemanfaatan modal sosial kultural yang kuat, partai ini berhasil memposisikan diri sebagai kekuatan dominan di Sumatera Barat. Fenomena ini juga menggaris bawahi pentingnya memahami konteks lokal dalam strategi politik, Dimana sebuah partai dapat sukses jika mampu menawarkan program yang relevan dan memiliki dukungan yang luas dari Masyarakat lokal. (Yunus, 2017)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas peneliti merumuskan masalah dengan melihat kemampuan gubernur dan partai politik pendukungnya melakukan konsolidasi sehingga dapat memenangkan pilgub di tahun 2015-2020.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana irwan prayitno pemenang pilgub mampu melakukan konsolidasi politik?
2. Bagaimana Partai keadilan Sejahtera (PKS) telah berhasil melakukan konsolidasi dukungan pada peta politik lokal dan partisipasi Masyarakat di Sumatera barat?

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Irwan Prayitno pemenang pilgub mampu melakukan konsolidasi politik.
2. Untuk mengetahui keberhasilan melakukan konsolidasi dukungan pada peta politik lokal dan partisipasi Masyarakat di Sumatera Barat.

### 1.4.2 Tujuan Praktis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi partai politik lain atau calon politik di Sumatera Barat dalam merumuskan kampanye politik yang relevan dengan dinamika politik dan agama.

### 1.4.3 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis mengenai peran partai politik berbasis agama dalam konteks politik lokal di Indonesia. Khususnya di Sumatera barat ini akan menjadi tambahan bagi studi-studi tentang politik dan fenomena partai politik dalam sistem demokrasi di Tingkat lokal.
2. Penelitian ini juga berkontribusi pada teori-teori politik terkait dengan perilaku pemilih di daerah dengan mayoritas islam.

#### 1.4.4 Manfaat Praktis

1. Dengan memahami faktor-faktor keberhasilan PKS dalam mendulang suara, penelitian ini dapat digunakan oleh Lembaga pemerintah atau organisasi Masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan positif di kalangan Masyarakat Sumatera Barat.
2. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi partai politik di Indonesia yang ingin mengadopsi pendekatan PKS dalam mengoptimalkan dukungan di daerah yang memiliki basis keagamaan kuat.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk memberikan Gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi : pada bagian awal penelitian ini, berisi tentang halaman judul, lembar persetujuan dosen pembimbing dan ketua kaprodi, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian inti skripsi : Bagian utama terdiri dari berbagai bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

- a. **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian. Selain itu, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian juga diuraikan secara rinci. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan yang menggambarkan alur skripsi.

- b. **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, diuraikan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu yang terkait juga dibahas untuk memperkuat dasar teori, kerangka pemikiran juga dijelaskan dibagian ini.

- c. **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, Jenis data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data ini bertujuan agar penelitian dapat

diulang atau diuji oleh peneliti lainnya.

**d. Bab IV Gambaran Umum**

Pada penelitian ini, peneliti membahas Gambaran umum tentang biografi Irwan Prayitno termasuk latar belakang kelahiran, lingkungan keluarga, Pendidikan yang ditempuh baik formal ataupun informal, prestasi-prestasi yang diterima oleh Irwan Prayitno. Dan membahas tentang Lokasi penelitian dan juga membahas tentang Partai PKS

**e. BAB V Hasil Dan Pembahasan**

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dengan menjelaskan observasi di lapangan untuk menunjang penelitian dan dilanjutkan dengan Analisa penulis terkait dengan penelitian yang diambil.

**f. BAB VI KESIMPULAN**

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan. Selain itu, Bab ini juga menjadi bagian terakhir dalam penelitian.

